

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan manusia merupakan fondasi dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Seiring dengan hal itu, paradigma pembangunan modern telah mengalami pergeseran, dari yang semula berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi pada saat ini arah paradigma pembangunan sudah menuju kepada pendekatan manusia sebagai subjek dan tujuan akhir pembangunan (*people centered development*). Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1979) dalam teori pembangunan manusia pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*), sebagaimana dikutip dalam (Bartolomei et al., 2024). Dalam pendekatan ini, pengukuran kesejahteraan yang selama ini didominasi oleh indikator moneter seperti produk domestik bruto (PDB), yang dinilai terlalu sempit karena tidak mampu menangkap dimensi kemanusiaan yang lebih luas, oleh karena itu, *Capability Approach* memfokuskan evaluasi kesejahteraan pada pendekatan kapabilitas, yakni kebebasan substantif yang dimiliki individu. Dalam perspektif ini, kesejahteraan tidak lagi diukur melalui sumber daya yang dimiliki, melainkan sejauh mana individu dapat mengakses peluang dan mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai fungsi ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial (Nassar, 2025).

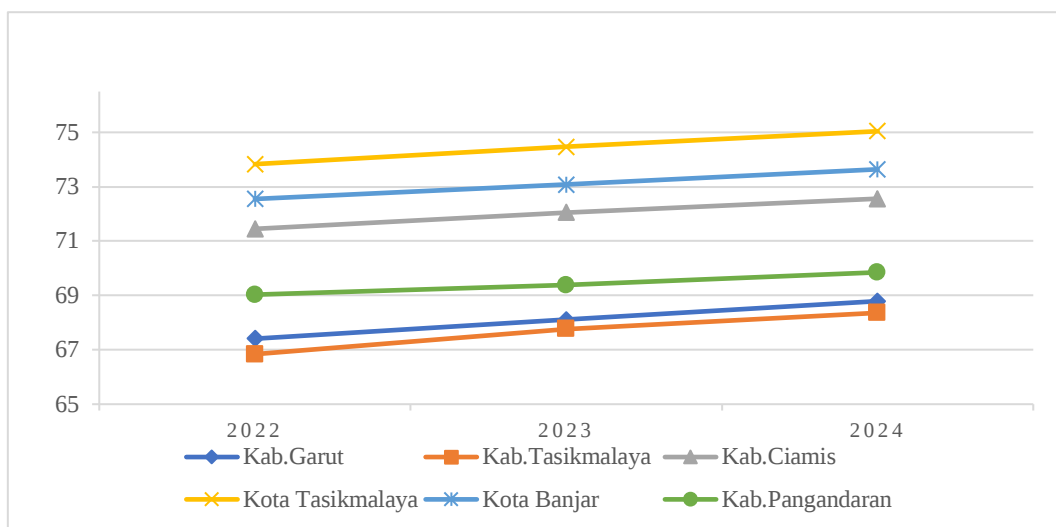
Sejak tahun 1990 konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), yaitu dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai capaian

pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui umur harapan hidup saat lahir yang menggambarkan tingkat kesehatan dan kualitas layanan kesehatan disuatu wilayah. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap akses pendidikan. Sementara itu, dimensi standar layak hidup diukur menggunakan *gross national income* (GNI) per kapita yang disesuaikan *purchasing power parity* (PPP), yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi tolak ukur utama untuk mengevaluasi keberhasilan suatu pembangunan, membandingkan kemajuan antarwilayah, dan merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Hestningsih et al., 2023). Selain itu, IPM juga digunakana secara luas oleh pemerintah sebagai indikator kinerja pembangunan nasional maupun daerah, sehingga memiliki relevansi yang tinggi dalam merumuskan kebijakan. Oleh sebab itu penggunaan IPM dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dalam mengenai keberhasilan pembangunan manusia di tingkat nasional dan daerah.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020-2024 indeks pembangunan manusia di Indonesia mencatatkan nilai rata-rata sebesar 73,83. Tren kenaikan yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang stabil secara nasional, mejadikan negara Indonesia masuk dalam kategori pembangunan manusia”tinggi”.

Peningkatan IPM dipengaruhi oleh perbaikan kesehatan, pendidikan dan faktor ekonomi, karena ketiga aspek tersebut merupakan dimensi utama yang mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Azizah Nurfayza et al., 2025). Akan tetapi capaian pembangunan manusia yang tinggi di tingkat nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah. Kesenjangan pembangunan manusia tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga di dalam provinsi itu sendiri, termasuk di Jawa Barat (Syarifudin et al., 2022). Salah satu kawasan yang menunjukkan tantangan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat ini adalah wilayah Priangan Timur, yang terdiri dari enam wilayah yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Kesenjangan capaian pembangunan manusia ini mengindikasikan bahwa distribusi hasil pembangunan manusia belum merata, dimana beberapa daerah belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kemajuan yang dicapai di tingkat provinsi maupun nasional (Artha Wicesa et al., 2024).

Secara umum, Kawasan Priangan Timur menunjukkan perkembangan IPM yang positif, ditandai dengan tren peningkatan IPM yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian IPM antar daerah masih menunjukkan tingkat capaian yang belum merata antar daerah, sehingga masing-masing wilayah berada pada kategori pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari nilai IPM masing-masing daerah sebagaimana ditunjukkan pada data berikut:



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di wilayah Priangan Timur tahun 2022-2024

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Jawa Barat

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Priangan Timur selama periode 2020-2024, wilayah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar secara konsisten berada pada kategori dengan IPM tinggi. Pada tahun 2024, Kota Tasikmalaya mencatatkan nilai IPM tertinggi sebesar 75,4 poin, diikuti oleh Kota Banjar sebesar 73,64 poin, dan Kabupaten Ciamis sebesar 72,56 poin. Sementara itu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran masih berada pada kategori IPM sedang. Pada tahun 2024, nilai IPM Kabupaten Garut tercatat sebesar 68,79 poin, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 68,36 poin dan Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 69,85 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pemerataan pembangunan manusia di wilayah Priangan Timur belum berkembang secara merata, meskipun masih dalam satu kawasan yang sama.

Perbedaan capaian IPM tersebut apabila dilihat dari karakteristik sosial dan ekonomi di wilayah Priangan Timur, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kab/Kota di wilayah Priangan Timur tahun 2020-2024

	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI				
KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Kab.Garut	-1.26	3.58	5.08	4.94	4.95
Kab.Tasikmalaya	-0.98	3.43	4.7	4.69	4.64
Kab.Ciamis	-0.14	3.66	5.02	4.99	4.97
Kab.Pangandaran	-0.05	3.67	5.03	5.26	5.12
Kota Tasikmalaya	-2.01	3.57	5.01	5.96	5.22
Kota Banjar	0.94	3.49	4.19	4.71	5.48
	KETIMPANGAN				
KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Kab.Garut	0.35	0.32	0.3	0.361	0.324
Kab.Tasikmalaya	0.34	0.38	0.38	0.404	0.363
Kab.Ciamis	0.34	0.34	0.34	0.341	0.326
Kab.Pangandaran	0.34	0.32	0.29	0.323	0.286
Kota Tasikmalaya	0.37	0.41	0.41	0.428	0.359
Kota Banjar	0.31	0.34	0.36	0.337	0.318

Sumber: Open Data Jabar

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi dan sosial pada Kab/Kota di wilayah Priangan Timur selama periode 2020-2024 relatif merata dan tidak menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh. Hal ini dapat dijelaskan melalui laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung seimbang antarwilayah, serta tingkat ketimpangan yang berada pada kisaran relatif seragam. Namun demikian meskipun kondisi sosial ekonomi yang masih, akan tetapi capaian IPM antarwilayah masih bervariasi meskipun masih dalam satu kawasan geografis yang sama. Kondisi ini sejalan dengan temuan Miranti & Mendez (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di tingkat Kab/Kota di Indonesia tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Hal ini

menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi dan sosial terdapat peran kebijakan dan intervensi pemerintah daerah sangat penting dalam memengaruhi capaian IPM di Priangan Timur.

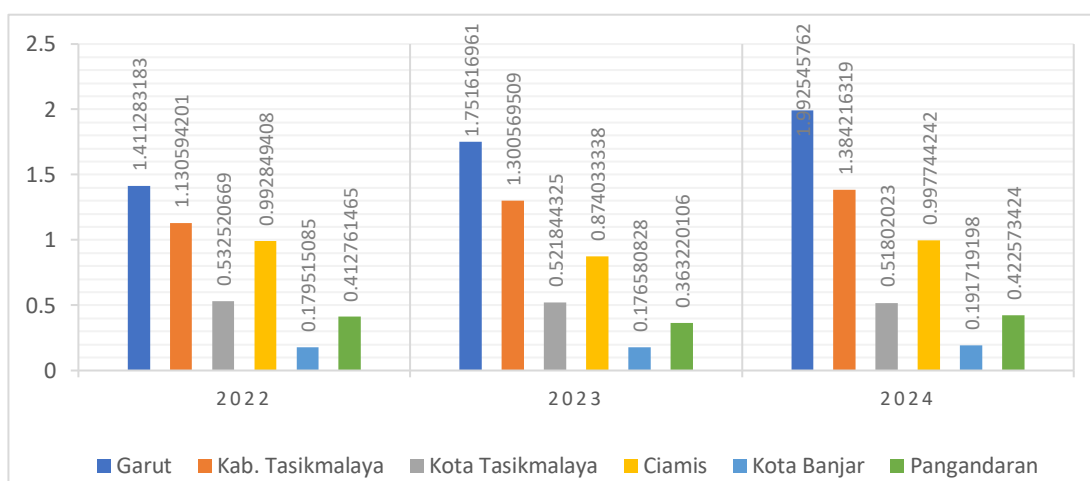
Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, peran pemerintah daerah menjadi faktor penting. Hal ini sejalan dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang secara resmi di mulai pada 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 tahun 1999 serta UU No, 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diperbarui melalui UU No 23. tahun 2014. Kebijakan tersebut menandai pergeseran sistem pengelolaan keuangan publik dari pola sentralisasi menuju otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengelola anggaran secara mandiri guna meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan publik di tiap daerah (Sijabat, 2016).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola kebijakan fiskal daerah serta memengaruhi kondisi ketenagakerjaan (Puspitasari & Setiawati, 2025). Pemerintah mempunyai peran dalam menyediakan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat seperti yang dinyatakan oleh Ningrum (2020) yaitu pengeluaran pemerintah merupakan refleksi dari kebijakan yang diprioritaskan oleh negara, di mana anggaran berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi dalam menyediakan layanan dasar bagi

masyarakat. Dalam konteks pembangunan manusia, peran tersebut di implementasikan melalui pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Ningrum (2020) sektor pendidikan dan kesehatan termasuk ke dalam fungsi alokasi, karena pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh pasar. Anggaran pemerintah digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tenaga pendidik dan medis, serta program pelayanan dasar. Disisi lain kebijakan pada kedua sektor tersebut juga mempunyai dimensi fungsi distribusi, karena diarahkan untuk menjadi pemerataan akses layanan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui berbagai skema, seperti subsidi, bantuan sosial, dan pelayanan berbasis kebutuhan. Sebagai wujud implementasi dari fungsi tersebut, pengelolaan pengeluaran pemerintah dilakukan melalui sistem penganggaran yang terstruktur dan memiliki landasan hukum yang jelas. Pemerintah pusat setiap tahun mengatur penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menjadi dasar hukum pada saat penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara (Kamaroesid, 2015).

Belanja pemerintah pada sektor pendidikan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan dimensi pengetahuan masyarakat. Alokasi anggaran yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan

tercermin pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (Yudy et al., 2021). Pentingnya investasi pada sektor pendidikan ditegaskan melalui temuan bahwa di negara-negara berkembang, pendidikan adalah prioritas investasi utama karena pengembalian sosialnya yang tinggi, sekitar 12% hingga 17%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya (Psacharopoulos et al., 2016). Meskipun pendidikan sebagai sektor prioritas, akan tetapi kondisi kapasitas fiskal pemerintah daerah berbeda-beda, perbedaan ini berpengaruh pada realisasi anggaran pendidikan yang tidak sama antar wilayah. Untuk melihat bagaimana belanja pendidikan yang direalisasikan oleh pemerintah daerah, dapat dilihat dari dana belanja pendidikan di wilayah Priangan Timur bisa dilihat dari data berikut:



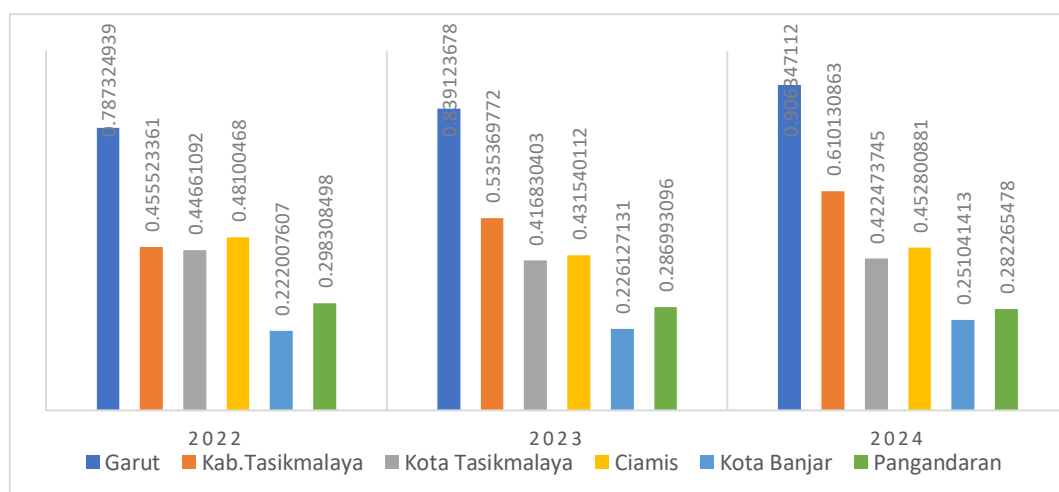
Gambar 1. 2 Dana Pendidikan Kab/Kota di wilayah Priangan Timur tahun 2022-2024 (Triliun rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan grafik dana belanja pendidikan diatas, terlihat perbedaan alokasi anggaran pendidikan antar Kab/Kota. Kabupaten Garut memiliki belanja

tertinggi dengan nilai sekitar Rp.1,99 pada tahun 2024, disusul dengan Kabupaten Tasikmalaya, dengan alokasi belanja pendidikan sekitar Rp.1,38 pada tahun yang sama. Sedangkan Kabupaten Ciamis mempunyai belanja pendidikan sekitar Rp.0,99 disusul dengan Kota Tasikmalaya dengan alokasi belanja Rp.0,52 Kota Banjar memiliki alokasi belanja yang lebih rendah, yaitu sekitar Rp.0,42 sedangkan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah dengan belanja pendidikan terendah, sekitar Rp.0,28. Perbedaan besaran belanja pendidikan antar daerah ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas dan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan sektor pendidikan. Meskipun Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki alokasi belanja pendidikan paling tinggi di wilayah Priangan Timur, akan tetapi capaian IPM di daerah tersebut masih rendah dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota lainnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bagas Ferdiansyah & Rahma Febrianti (2025); Fadillah & Setiartiti, (2021); Paulus Ratuludji et al., (2023); Puspitasari & Setiawati, (2025) belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Syah & Soelistyo (2022); Goldani & Momeni, (2023); Puspitasari & Setiawati, (2025) menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Temuan ini menjelaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan capaian pembangunan manusia apabila pengelolaan anggaran yang belum tepat sasaran. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga merupakan dimensi penting dalam pembangunan manusia. Belanja pemerintah pada sektor kesehatan menjadi salah satu dimensi utama dalam peningkatan kualitas

pembangunan manusia, belanja kesehatan ini memiliki peran krusial dalam memperbaiki dimensi kesehatan yang diukur melalui peningkatan umur harapan hidup (Miranda-Lescano et al., 2023). Melalui peningkatan alokasi anggaran kesehatan, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan medis, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta memperkuat kapasitas tenaga medis di berbagai tingkatan pelayanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan umur harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Banik et al., 2023). Oleh karena itu, belanja kesehatan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan umur harapan hidup sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut juga dapat dilihat di wilayah Priangan Timur, di mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dalam APBD nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari data berikut yang menunjukkan perkembangan dana alokasi kesehatan di wilayah Priangan Timur pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Dana Kesehatan Kab/Kota di wilayah Priangan Timur tahun 2022-2024 (Triliun rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

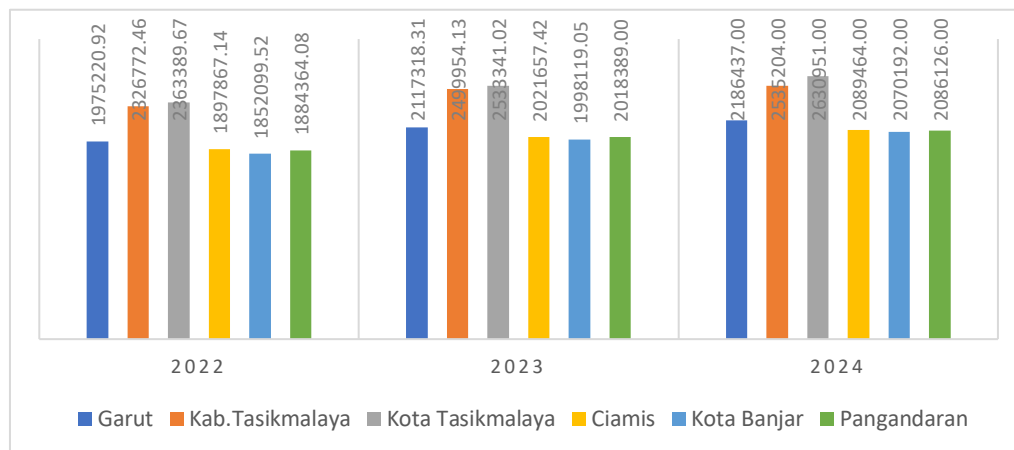
Berdasarkan grafik dana kesehatan tahun 2022-2024 pada beberapa Kab/Kota di wilayah Priangan Timur, terlihat adanya perbedaan pola dan besaran alokasi dana kesehatan antar daerah. Kabupaten Garut pada tahun 2024 memiliki alokasi dana kesehatan tertinggi, yaitu sekitar Rp.0,91. Selanjutnya, Kabupaten Tasikmalaya alokasi dana kesehatannya sekitar Rp.0,61. Sedangkan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya memiliki besaran dana kesehatan yang relatif berdekatan, masing-masing sebesar sekitar Rp.0,42 dan Rp.0,45 Kabupaten Pangandaran memiliki alokasi dana kesehatan yang lebih rendah yaitu sekitar Rp.0,28. Sementara itu Kota Banjar merupakan daerah dengan alokasi dana kesehatan paling rendah pada tahun 2024, dengan dana kesehatan sekitar Rp.0,25. Perbedaan alokasi dana kesehatan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam pembiayaan sektor kesehatan di masing-masing daerah. Meskipun Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki alokasi belanja paling tinggi di wilayah Priangan Timur, akan tetapi capaian IPM di daerah tersebut masih rendah dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota lainnya. Hasil penelitian dilakukan oleh (Bagas Ferdiansyah & Rahma Febrianti, 2025; Fadillah & Setiartiti, 2021; Puspitasari & Setiawati, 2025) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Banik et al. (2023); Oki et al., (2023); Widodo et al., (2019) berpengaruh negatif terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran kesehatan belum tentu secara langsung meningkatkan IPM. Temuan ini mengisyaratkan bahwa alokasi dana yang tinggi tidak cukup,

diperlukan ketepatan dalam peyaluran anggaran untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan agar mampu mending peningkatan umur harapan hidup.

Selain melalui instrumen kebijakan fiskal, peningkatan, IPM juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap daya beli dan kemampuan pekerja dalam mengakses kesehatan maupun pendidikan (Hestningsih et al., 2023). Kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, yang menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah (upah pokok+tunjangan tetap) untuk melindungi pekerja, dengan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, melalui putusan MK NO. 18/PUU-XXI 2023.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki peranan strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena secara langsung memengaruhi daya beli, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar layak hidup (Rahayu et al., 2025). Menurut Hestningsih et al. (2023) upah minimum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara produktivitas tenaga kerja dan kelayakan hidup pekerja di suatu daerah. Di wilayah Priangan Timur, perbedaan upah antar Kabupaten/Kota mencerminkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di

masing-masing daerah. Hal ini dapat dilihat dari data berikut yang menunjukkan perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Priangan Timur pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Upah Minimum Kab/Kota wilayah Priangan Timur tahun 2022-2024 (juta rupiah)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat

Berdasarkan data upah minimum Kab/Kota, di wilayah Priangan Timur, terlihat adanya perbedaan tingkat upah antar daerah. Kota Tasikmalaya memiliki UMK tertinggi, yaitu sekitar 2,65 juta rupiah. Diikuti oleh Kabupaten Tasikmalaya sebesar 2,55 juta rupiah. Selanjutnya, Kabupaten Garut memiliki UMK sekitar 2,18 juta rupiah. Kabupaten Ciamis memiliki tingkat UMK sekitar, 2,08 juta rupiah. Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat UMK sekitar 2,08 juta rupiah. Sementara itu Kota Banjar merupakan daerah dengan UMK terendah, yaitu sekitar 2,06 juta rupiah. Perbedaan UMK tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi pasar tenaga kerja dan kebijakan pengupahan antar Kab/Kota di wilayah Priangan Timur. Peningkatan pendapatan akan memperluas kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, tidak hanya mencakup pangan dan papan,

tetapi juga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas (Habib et al., 2025). Peningkatan upah berimplikasi pada meningkatkannya pendapatan pekerja khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah yang memiliki kecenderungan mengkonsumsi (*marginal propensity consume*) relatif tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar tambahan pendapatan akan dialokasikan untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Keynes dalam teori konsumsi menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima pekerja setelah dikurangi pajak dan kewajiban lainnya, merupakan *disposable income* merupakan determinan utama pengeluaran rumah tangga, sehingga UMK berperan sebagai instrumen pendapatan yang menentukan daya beli (*purchasing power*) masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas (Agbarakwe & M, 2025). Akan tetapi dari hasil data diatas menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tasikmalaya mempunyai UMK tertinggi akan tetapi capaian IPM nya masih berada pada kondisi sedang, Sebaliknya, Kota Banjar meskipun mempunyai UMK terendah akan tetapi capaian IPM nya berada pada kategori tinggi, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara UMK dan IPM tidak selalu bersifat linear secara langsung di setiap daerah. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hestningsih et al., (2023); Rahayu et al., (2025); Tria Resmana & Gunawan, (2025) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Izzah & Hendarti, (2021); Yulianty & Iin, (2023), menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap IPM.

Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap variabel-variabel ini sangat penting untuk menemukan solusi komprehensif dalam upaya meningkatkan angka kesejahteraan dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan di wilayah Priangan Timur. Pemilihan wilayah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fenomena kesenjangan capaian IPM yang cukup mencolok dalam satu kawasan yang berdekatan. Di satu sisi, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kota Banjar yang sudah cukup maju dengan status IPM Tinggi. Namun, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pangandaran, mempunyai capaian IPM-nya masih tertinggal di kategori sedang. Perbedaan ini antara daerah kota dan kabupaten dalam satu wilayah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pentingnya peran belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dalam konteks regional. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana belanja pendidikan, belanja kesehatan dan upah minimum memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam konteks regional Priangan Timur. Meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya manusia, akan tetapi masih menghadapi beberapa tantangan dalam capaian IPM nya. Selain itu terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara penelitian lain menemukan hasil yang negatif atau tidak signifikan. Demikian pula

pada variabel upah minimum, yang menunjukkan hubungan yang tidak konsisten terhadap IPM di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi anggaran dan kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebaruan (*Novely*) penelitian ini terletak pada penggunaan UMK sebagai variabel kebijakan ketenagakerjaan dengan cakupan wilayah Kab/Kota di wilayah Priangan Timur serta periode analisis terbaru, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai peran kebijakan fiskal dan ketenagakerjaan terhadap pembangunan manusia di tingkat daerah. Dengan melihat fenomena pada rangkaian literatur diatas dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan faktor penyebabnya, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian **Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur Tahun 2020-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi terkait permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja kesehatan, belanja pendidikan dan upah minimum secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh belanja kesehatan, belanja pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur pada tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat menguraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum secara *parsial* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur 2020-2024?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan upah minimum secara *simultan* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur 2020-2024?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Penelitian ini membantu pembaca dan penulis dalam menganalisis, mengenai belanja pemerintah di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan upah minimum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur pada tahun 2020-2024.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran pendidikan, kesehatan, serta kebijakan upah minimum untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur.
2. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
3. Menambahkan informasi dan referensi bacaan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di wilayah Priangan Timur dengan enam kabupaten/kota yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan upah minimum, saling memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Priangan Timur.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dan mulai diterbitkannya SK pembimbing. Adapun rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

